



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON
PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI
SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta optimalisasi penyelenggaraan perizinan, non perizinan dan pelimpahan sebagian urusan kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di Kabupaten Bekasi yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat; (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 319);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI**

Pasal I

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi diubah beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Nomor urut 2 dan Nomor urut 17 diubah dan diantara nomor urut 66 dan nomor urut 67 disisipkan Nomor urut baru-yakni Nomor urut 66.a, 66.b, 66.c, 66.d, 66.e, 66.f, 66.g, 66.h sehingga berbunyi sebagaimana tercantum Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pada Lampiran II angka 1 antara huruf i dan huruf j disisipkan huruf baru yakni i.1 dan huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II angka 13 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

4. Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 31 Oktober 2011

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 31 Oktober 2011

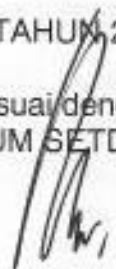
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd.

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI


DEDDY ROHENDI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 32 TAHUN 2011

TANGGAL : 31 OKTOBER 2011

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON PERIZINAN DAN
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWEWENANGAN KEPADA
CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN
OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

1 JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	2	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
1	Izin lokasi	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	-	Luas 10 Ha keatas oleh Bupati
2	Izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	-	Luas 10 Ha keatas oleh Bupati
3	Izin mendirikan bangunan (IMB) umum dan bangunan negara;	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	-	-
4	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
5	Izin usaha jasa konstruksi (SIUJK)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
6	Izin undang-undang gangguan (HO)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
7	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
8	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
9	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
10	Izin kerja malam bagi tenaga kerja wanita (IKMW)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
11	Surat Izin Usaha Kepariwisataa (SIUK)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
12	Izin praktek Dokter Hewan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
13	Izin pendirian sekolah	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
14	Izin peternakan, perikanan dan kelautan;	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
15	Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-

1 JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Rekomendasi Pemasangan Lampu PJU	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-
Pemakaian kekayaan daerah (Fasos Perumahan)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin layak huni dan persewaan perumahan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik pemerintah ataupun milik perusahaan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin penimbunan bahan bakar cair	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin pemanfaatan limbah non B3 yang bernilai ekonomis	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin usaha bengkel alat dan mesin Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin usaha obat hewan ditingkat depot toko kios dan pengecer	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan, perikanan dan kelautan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin rumah potong hewan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin produksi bibit hewan & ikan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin Tempat Pelelangan Ikan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan Kartu Jaminan/Garansi	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin usaha kawasan industri	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Tanda Daftar Gudang	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin usaha pasar modern dengan luas kurang dari 2000 m2	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin parkir diluar badan jalan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin pendidikan dan latihan luar sekolah	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
Izin kegiatan kebudayaan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-

1 JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
1 Izin pengelolaan air kotor dan lumpur tinja	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
2 Izin Optical	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
3 Izin Toko Obat	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
4 Izin Usaha Jasa Boga (Catering)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
5 Izin tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
6 Izin Klinik Kebugaran	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
7 Izin Salon Kecantikan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
8 Izin industri kosmetik	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
9 Izin Tukang Gigi	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
10 Izin pengobatan tradisional	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
11 Izin Bapel JPKM	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
12 Izin industri obat tradisional	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
13 Izin lembaga perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Swasta (LPPKS)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
14 Izin pemakaian pesawat uap	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
15 Izin pemakaian bejana tekanan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
16 Izin pemakaian pesawat angkut	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
17 Izin pemakaian motor diesel	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
18 Izin instalasi listrik dan penyaluran petir	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
19 Izin penyimpangan waktu kerja	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
20 Izin usaha angkutan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
21 Izin Bongkar Muat	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
22 Izin eksplorasi air bawah tanah	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
23 Izin pengeboran (SIP)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-

1 JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
1. Izin pengendalian air bawah tanah (SIPA)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
2. Izin penurapan (SIP) dan pengembalian mata air (SIPMA)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
3. Izin juru bor (SIJB)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
4. Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
5. Persetujuan Prinsip Lokasi (PPL)	BAPPEDA	BAPPEDA	-	-
6. Izin Pemasangan Reklame	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	LUAS SAMPAI DENGAN 10 M. OLEH KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	-	Luas 10 M keatas oleh Bupati
7. Izin lahan aplikasi pertambangan di kabupaten	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
8a. Pendaftaran Penanaman Modal	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
8b. Izin Prinsip Penanaman Modal	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
8c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
8d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
8e. Izin Usaha Penanaman Modal	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
8f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
8g. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
8h. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
9. Izin usaha pengelolaan energi non migas di luar radioaktif dan air bawah tanah	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
10. Izin/KP Penyelidikan umum pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
11. Izin/KP Pengolahan dan pemurnian barang tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
12. Izin/KP Pengangkutan/penjualan barang tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-

1	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6	
1	Surat keterangan Izin peninjauan (SKIP) Pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
2	Izin bekerja eksplorasi pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
3	Izin produksi/ tambang percobaan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
4	Izin pengiriman contoh hasil tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
5	Izin juru ledak (Kartu Izin meledakan) di pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
6	Rekomendasi re-ekspor barang peralatan pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
7	Rekomendasi pengembangan pelabuhan khusus kegiatan tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
8	Rekomendasi perubahan akte pendirian perusahaan pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
9	Rekomendasi perubahan investasi pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
10	Rekomendasi pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
11	Rekomendasi penghapusan barang modal pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
12	Izin gudang bahan peledak	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
13	Rekomendasi import barang/peralatan dengan fasilitas OB 23	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
14	Rekomendasi survey clearance survey udara	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
15	Pengesahan AMDAL bagi perusahaan wajib AMDAL, RKL, RPL, UKL ataupun UPL	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
16	Rekomendasi kelaikan pabrik zat asam dan asitelin	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
17	Perizinan pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
18	Izin pemanfaatan Damaja, Damija, dan Dawasja untuk jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
19	Izin pembangunan jalan Tol di dalam Kabupaten (Non lintas Kabupaten)	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-

1	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6	
1	Izin mendirikan, mengubah, membongkar bangunan yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu Kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
2	Izin mendirikan, mengubah, membongkar bangunan yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
3	Izin operasi kapal keruk/kapal hisap	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
4	Rekomendasi PIL banjir	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
5	Izin praktek perorangan dokter umum	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
6	Izin praktek perorangan dokter gigi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
7	Izin praktek berkelompok dokter umum	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
8	Izin praktek berkelompok dokter gigi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
9	Izin balai pengobatan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
10	Izin rumah bersalin	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
11	Izin praktek bidan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
12	Izin praktek perawat gigi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
13	Izin praktek perorangan dokter spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
14	Izin praktek perorangan dokter gigi spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
15	Izin praktek berkelompok dokter spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
16	Izin praktek berkelompok dokter gigi spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
17	Izin Rumah Sakit Umum	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
18	Izin Rumah Sakit Khusus	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
19	Izin Klinik Radiologi Swasta Perorangan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
20	Izin Laboratorium Kesehatan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
21	Izin Apotik	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
22	Izin Klinik Fisioterapi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
23	Izin Industri Farmasi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
24	Izin Pedagang Besar Farmasi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
25	Izin Industri Alat Kesehatan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
26	Izin Pest Kontrol	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
27	Izin Industri Makanan dan Minuman	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
28	Izin pendirian dan usulan penutupan Universitas / Institut/ Sekolah Tinggi dan Politeknik Negeri dan Swasta	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	-	-
29	Rekomendasi angka pengenal import	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
30	Izin pengelolaan sampah pasar tradisional	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
31	Surat keterangan asal barang/Certificate Origin (CO)	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	-	-

1 JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
11. Izin pemeliharaan prasarana dan sarana pasar dan kebersihan	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
12. Izin hak guna pakai bangunan di lingkungan pasar	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
13. Izin dan retribusi di bidang kebersihan pasar	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
14. Pemberian dan pengawasan izin sewa beli	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
15. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol(SIUP-MB) untuk pengencer/penjual langsung untuk minum	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
16. Izin penggunaan ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
17. Izin bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan fasilitasi pembayaran serta simpan pinjam	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
18. Rekomendasi penyelenggaraan parkir dan izin parkir didalam lingkungan pasar	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
19. Izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
20. Izin trayek angkutan kota/ pedesaan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
21. Izin operasi Taksi yang melayani wilayah Kabupaten	DEPERIDAGKOP & UMKM	DEPERIDAGKOP & UMKM	-	-
22. Izin usaha penyelenggaraan sekolah/ pendidikan dan latihan mengemudi	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
23. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond) jaring terapung dan keramba di sungai dan danau.	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
24. Izin pembangunan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
25. Izin dispensasi penggunaan jalan bukan peruntukannya	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
26. Izin penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas;	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
27. Rekomendasi penyelenggaraan parkir diluar badan jalan (off street)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
28. Izin perparkiran di badan jalan (on street)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
29. Rekomendasi analisis dampak lalu lintas (ANDALLALIN)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
30. Izin penyelenggaraan perbengkelan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
31. Izin penyelenggaraan pool kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
32. Izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
33. Rekomendasi penetapan DLK/DLKp pelabuhan laut regional	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
34. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-

1 JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	2 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
3	4	5	6	
1. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
2. Izin kegiatan pengerukan di DLK/DLKp pelabuhan laut lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
3. Izin kegiatan reklamasi di DLK/DLKp pelabuhan laut lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
4. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
5. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada batas pelabuhan dalam kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
6. Izin usaha pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada batas pelabuhan dalam wilayah kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
7. Izin usaha tally di pelabuhan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
8. Izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
9. Izin usaha ekspedisi / freight forwarder	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
10. Rekomendasi penerbitan usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PPA)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
11. Rekomendasi pendirian pusat jasa titipan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
12. Izin jasa titipan untuk kantor agen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
13. Izin penyelenggaraan komunikasi tidak menggunakan spektrum frekwensi radio	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
14. Rekomendasi izin penyelenggaraan jaringan tertutup lokal	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
15. Rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
16. Izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (TKR/G).	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
17. Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
18. Saran teknis mendirikan bangunan Menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
19. Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
20. Izin hinder dan ordonatie (Ordonasi gangguan frekwensi)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
21. Rekomendasi instalasi penangkal petir	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
22. Izin instalasi genset	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
23. Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-

JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
Izin pengguna spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
Izin pelayanan umum di bidang hortikultura	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	-	-
Rekomendasi Pengakuan sebagai perusahaan penampung terdaftar kaya lahan	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	-	-
Izin pelayanan umum di bidang pengawasan dan pengendalian tata ruang serta pemanfaatan tanah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
Aspek Tata Guna Lahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Saran teknis izin lokasi	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Penetapan Izin Lokasi	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang permukiman	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Master Plan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Advice Planning	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Peta Bidang Tanah	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Block Plan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Site Plan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Saran teknis izin peruntukan penggunaan tanah	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Pemberiaan Saran teknis Izin Mendirikan Bangunan baru, kecuali Saran Teknis IMB Rumah Tinggal Tunggal	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Saran teknis Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Saran Teknis Bangunan Stata Title	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Saran teknis bangunan khusus (Hotel, kondominium, apartemen, rumah susun)	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Saran teknis izin layak huni	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Penggunaan lahan fasos perumahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
Serah terima sarana, prasarana dan utilitas perumahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-

1. JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
1. S.K nama jalan untuk kawasan perumahan dan kawasan industri	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
2. Site Plan kapling rumah tinggal perumahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
3. Pemecahan IMB induk perumahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
4. Izin pelayanan umum di bidang pertamanan	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-
5. Izin tempat pembuangan akhir sampah	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-
6. Izin pelayanan umum di bidang pemakaman	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-
7. Rekomendasi Pemadam Kebakaran	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-
8. Izin praktek psikologi ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
9. Izin tempat penampungan TKI	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
10. Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
11. Rekomendasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
12. Akte pengawasan dan wajib lapor ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
13. Izin lembaga pelatihan kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
14. Izin penempatan tenaga kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
15. Izin pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
16. Izin usaha perluasan kesempatan kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
17. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Warga Negara Asing (TMTA)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
18. Izin bursa kerja khusus (BKK)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
19. Izin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
20. Izin penampungan Tenaga Kerja Indonesia	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
21. Izin Lembaga Pemagangan dalam negeri	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
22. Izin pelatihan sambil bekerja ke luar negeri	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
23. Izin LPK dan pelatihan lainnya yang non kurikulum Departemen Pendidikan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
24. Rekomendasi pendaftaran dan perjanjian kontrak kerja.	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
25. Rekomendasi catering, poliklinik dan dokter unit perusahaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
26. Izin pemakaian instalasi penyalur petir di tempat kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-

JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
		SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
izin benda cagar budaya dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya dalam satu propinsi	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
Rekomendasi Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK)	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
Pier registrasi SIUK	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PARIWISATA,BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
Rekomendasi Pendirian Panti Sosial dan Yayasan yang bergerak di bidang sosial	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	-	-

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 31 Oktober 2011
BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

ttd

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR..

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI


DEDDY ROHENDI